

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

V.1 Simpulan

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menguji dan mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Opini Audit, Ukuran Legislatif, dan *Intergovernmental Revenue* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil dan pembahasan setelah dilakukan analisis data dan pengujian mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Opini Audit, Ukuran Legislatif, dan *Intergovernmental Revenue* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada 113 Kabupaten/Kota di pulau Jawa tahun 2015 dan 2016, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan tingkat signifikansi 0,024 lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu 0,05 hal ini menunjukkan bahwa PAD sebagai salah satu komponen yang mampu menghasilkan kekayaan suatu daerah dapat meningkatkan kinerja keuangan sebagai cerminan pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah bersangkutan mampu mengelola keuangannya secara efisien.
- b. Opini Audit berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan tingkat signifikansi 0,046 lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu 0,05 hal ini menunjukkan bahwa opini audit sebagai hasil akhir dari pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI dapat menunjukkan akuntabilitas atas pelaporan yang baik sehingga berpengaruh pada kinerja keuangan yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah.
- c. Ukuran Legislatif berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu 0,05 hal ini menunjukkan bahwa ukuran legislatif atau anggota jumlah DPRD berperan aktif dalam melakukan pengawasan dan penyelenggaraan untuk membuat kinerja keuangan lebih baik dan terkendali.

d. *Intergovernmental Revenue* tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan tingkat signifikansi 0,620 lebih besar dari taraf signifikansi yaitu 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa IRGOV belum mampu sepenuhnya untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah karena dana eksternal yang diterima tidak dikelola dengan maksimal untuk mendanai kebutuhan kegiatan pemerintah daerah dan juga masih terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antara dana eksternal yang diberikan ke daerah dengan daerah lainnya.

V.2 Saran

Dalam penelitian ini telah diperoleh kesimpulan dan memiliki beberapa keterbatasan, sehingga untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik terdapat saran yang diberikan kepada pemerintah daerah dan peneliti selanjutnya.

Untuk pemerintah daerah selaku pelaksana kinerja keuangan daerah agar dapat memperhatikan hal-hal terkait kebijakan dan peraturan sehingga mampu memperbaiki sekaligus meningkatkan kinerja keuangan dalam anggaran APBD yang lebih efektif dan efisien. Pemerintah daerah agar stabil dalam mengoptimalkan pendapatan murni daerahnya dan mampu mengelola dana eksternal yang didapatkan secara ekonomis, begitu juga dengan pengawasan yang dilakukan oleh para anggota DPRD (legislatif) yang memiliki kualitas terbaik untuk menjalankan kegiatan operasional daerahnya sehingga mampu menghasilkan opini audit yang maksimal untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat yang akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Untuk peneliti selanjutnya dengan variabel dependen yang sama agar dapat menambahkan variabel independen lain diluar dari penelitian ini seperti karakteristik pemerintah daerah, belanja daerah, ukuran pemerintah daerah, leverage dan belanja modal serta menambahkan sampel penelitian juga waktu pengamatan sehingga mampu memiliki hasil yang lebih baik untuk dapat dijadikan referensi bagi para peneliti lainnya.